

DAFTAR PUSTAKA

1. Literatur

Arief, Barda Nawawi. 2002. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Kencana Prenada Media Group : Jakarta

-----2008. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Kencana Prenada Media Group : Jakarta

Badan Narkotika Nasional. 2006. *Kamus Istilah*.

Hadikusuma ,Hilman. 1995 *Metode Pembuatan Kertas Kerja atau Skripsi Ilmu Hukum*, Mandar Maju:Bandung

Ishaq S, 2009. *Dasar-dasar Hukum* . SINAR GRAFIKA :Jakarta.

Joni , Muhammad dan Zulchaina Tanamas, 1999, *Aspek Hukum Perlindungan anak dalam Perspektif Kovensi Anak*, Citra Aditya Bakti : Bandung.

Soekanto ,Soerjono.2008. *Pengantar Penelitian Hukum*. Universitas Indonesia Press. Jakarta

-----1986. *Pengantar Penelitian Hukum*. Universitas Indonesia Press. Jakarta

-----1986. *Faktor-Faktor yang mempengaruhi penegakan hukum*. Rajawali: Jakarta.

S , Siswanto.2012. *Politik Hukum Dalam Undang-Undang Narkotika*. PT. Rineka Cipta: Jakarta

Sudarto, 1981, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Alumni, Bandung

Soekanto ,Soerjono & Sri Mamudji. 2001. *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, Rajawali Pers: Jakarta.

Thontowi, Jawahir,2007. *Pengantar Ilmu Hukum.*, PUSTAKA FAHIMA: Jogjakarta

Tumpa, Harifin A. 2011; *Komentar Dan Pembahasan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika*. Sinar Grafika:Jakarta

2. Perundang-Undangan

Undang – undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penempatan

Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkotika ke Dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial

Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Wajib Laporan Pencandu Narkotika

Instruksi Presiden No. 12 Tahun 2011 Tentang Pelaksanaan Kebijakan Dan Strategi Nasional Pencegahan Dan Pemberantasan Penyalahgunaan Dan Peredaran Gelap Narkotika Tahun 2011 Dan 2015 (Jakstranas P4GN).

Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia no. 1305/MENKES/SK/VI/2011 Tentang Institusi Penerima Wajib Laporan.

Keputusan Menteri Sosial No. 31/HUK/2012 Tentang Lembaga Rehabilitasi Sosial Korban pecandu Narkotika sebagai IPWL.

Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 420/ MENKES/ SK/III/2010 Pedoman Layanan Terapi Dan Rehabilitasi Komprehensif Pada Gangguan Penggunaan Napza Berbasis Rumah Sakit.

Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 421/ MENKES/ SK/III/2010 Tentang Standar Pelayanan Terapi dan Rehabilitasi Gangguan Penggunaan NAPZA.

Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 422/ MENKES/ SK/III/2010 Tentang Pedoman Penatalaksanaan Medik Gangguan Penggunaan NAPZA

3. Media Massa dan Internet

Majalah KOMUNIKA “Dunia Indah Tanpa Narkotika” edisi 8 Tahun VIII, April 2012

<http://www.anakciremai.com/2008/04/created-nina-eliyana-school-lp2k-satya.html>

<http://dedihumas.bnn.go.id>

<http://www.psychologymania.com/2012/08/pengertian-rehabilitasi-narkoba.html>

<http://www.merriam-webster.com/dictionary/narcotic>

<http://www.novariyantiyusuf.net/kesehatan-jiwa/artikel-program/201-memeriksa-ipwl-institusi-penerima-wajib-lapor-pecandu-narkotika.html>

http://m.mediaindonesia.com/index.php/read/2012/01/31/295383/284/1/PHBI_Tolak_Penyalah_Guna_Narkotika_Masuk_Penjara

http://www.gepenta.com/a,public-m,dinamic-s,pdf-ids,12-id,51-lang,id-c,artikel_t,Membangun+Paradigma+Dekriminalisasi+Korban+Pengguna+Narkoba-.phpx

detikbandung.com edisi jumat 06 Mei 2011 pukul 00.52 WIB.